	NOMOR SOP	W.25.SDM.SDM.1.OT.02.02-741			
	TANGGAL PEMBUATAN	29 September 2023			
	TANGGAL REVISI	25 Maret 2024			
PENGAYOMAN	TANGGAL EFEKTIF	25 Maret 2024			
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	DISAHKAN OLEH	KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA			
BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia		DAN HAW SULAWESI UTAKA			
Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara		#KUMHAMPASTI			
		Ditandatangani secara elektronik oleh :			
		Wahju Prihandono NIP 197210081999031001			
OVER DA OVANJEJA DA VIGAVIA	NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER O				
SUB BAGIAN TATA USAHA	NAMA SOP	PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT			
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA	:			
 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2002 2 Undang-undang No. 8 tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian PP No. 99 tahun 2000 jo PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kep. Ka. BKN No. 12 Tahun 2001 tanggal 17 juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNs jo PP No. 12 Tahun 2002 Kep. Ka. BKN No. 13 tahun 2003 tanggal 21 april 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS 	Memahami tentang kenaikan pangk Mengetahui tugas dan fungsi Sisten	n dan Prosedur Pemerintahan.			
 Undang-undang No. 8 tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian PP No. 99 tahun 2000 jo PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kep. Ka. BKN No. 12 Tahun 2001 tanggal 17 juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNs jo PP No. 12 Tahun 2002 Kep. Ka. BKN No. 13 tahun 2003 tanggal 21 april 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan 	2. Memahami tentang kenaikan pangk	at. n dan Prosedur Pemerintahan.			
 Undang-undang No. 8 tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian PP No. 99 tahun 2000 jo PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kep. Ka. BKN No. 12 Tahun 2001 tanggal 17 juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNs jo PP No. 12 Tahun 2002 Kep. Ka. BKN No. 13 tahun 2003 tanggal 21 april 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS 	Memahami tentang kenaikan pangk Mengetahui tugas dan fungsi Sisten	at. n dan Prosedur Pemerintahan. PAN:			
 Undang-undang No. 8 tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian PP No. 99 tahun 2000 jo PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kep. Ka. BKN No. 12 Tahun 2001 tanggal 17 juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNs jo PP No. 12 Tahun 2002 Kep. Ka. BKN No. 13 tahun 2003 tanggal 21 april 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS 	2. Memahami tentang kenaikan pangk 3. Mengetahui tugas dan fungsi Sisten PERALATAN / PERLENGKA	at. n dan Prosedur Pemerintahan. PAN: ntor			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT

	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				
NO		KANWIL	KABADIKLAT	KASUBAG TU	JF KEPEGAWAIA N	PEGAWAI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Mengumpulkan data nominatif daftar PNS yang akan naik pangkat				Mulai		rangkap: a. Salinan / fotocopy sah keputusan dalam	1. Surat – SK Kenaikan Pangkat hari 2. Proses Surat Keputusan	Kenaikan	
2	Memeriksa daftar pegawai yang akan naik pangkat dan mengajukan surat pemberitahuan kenaikan pangkat				—		tahun terakhir; c. Salinan / fotocopy sah Surat Tanda Tamat Belaja / Ijazah / Diploma	kenaikan pangkat -/+ (tiga) bulan		
3	Melakukan Penelitian terhadap jenis arsip yang akan dialihmediakan dan mempersiapkan jenis peralatan alih media						bagi yang memperoleh peningkatan Pendidikan; d. Asli penetapan			
4	Menyetujui / menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Pangkat Pegawai		-				angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan			
5	Mengedarkan Surat Pemberitahuan KP				→		fungsional tertentu. e. Salinan / fotokopi SK Jabatan, Surat Prnyataan			
6	Melengkapi dan mengajukan persyaratan KP					-	Pelantikan, Surat Pernyataan melaksanakan tugas pejabat structural atau fungsional tertentu			

NO	VEGLATIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			TOTAL AND AND	
NO	NO KEGIATAN	KANWIL	KABADIKLAT	KASUBAG TU	JF KEPEGAWAIAN	PEGAWAI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
7	Memeriksa kelengkapan persyaratan KP dan menginput usulan ke dalam system SAPK									
8	Membuat konsep surat usulan kenaikan pangkat dilengkapi daftar pegawai yang akan naik pangkat									
9	Mengajukan Surat pengantar usulan Kenaikan Pangkat untuk ditandatangani Kakanwil dan melegalisir berkas persyaratan KP			-						
10	Menyetujui / menandatangani Surat Usulan kenaikan Pangkat	<u> </u>								
11	Menerima dan Memproses Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Badiklat Sulut	Selesai								

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara



Wahju Prihandono NIP 197210081999031001